

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Etika Profesionalisme Jurnalistik

Etika merupakan konsep penilaian atas tindakan sosial yang di dasari oleh hukum atau aturan suatu kelompok/organisasi. Menurut Hambali *et. al.* (2021: 69), bahwa etika adalah kebiasaan hidup yang baik dan berisi tentang ajaran, perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari. Dalam penerapannya etika sering memiliki karakteristik yang berbeda sesuai tempat asalnya. Ini menandakan bahwa setiap perkumpulan orang/organisasi memiliki aturan, tradisi dan budaya yang berbeda – beda. Etika dapat menunjukkan bagaimana kebiasaan yang di terapkan dalam organisasi Etika dapat terbentuk di dasari dari sebuah kebiasaan yang di miliki oleh sebuah organisasi. Tentunya etika ini memberikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku Sehingga jika seseorang melanggar etika maka secara umum mendapatkan sanksi sosial dari sekelompok orang.

Untuk itu etika dapat di terapkan dalam berbagai aspek aspek kehidupan terutama dalam pekerjaan. Dalam dunia pekerjaan etika profesi merupakan hal yang biasa ada dalam sebuah organisasi. Etika profesi adalah kumpulan prinsip dan norma moral yang mengatur perilaku dan tindakan seseorang yang bekerja dalam suatu profesi tertentu. Etika profesi bertujuan untuk memastikan bahwa seorang profesional bertindak dengan integritas, tanggung jawab, dan menghormati hak serta kepentingan klien atau masyarakat luas. Etika ini membantu profesional untuk membuat keputusan yang benar dalam konteks pekerjaan mereka, serta menjaga standar kualitas dan kepercayaan dalam hubungan mereka dengan klien rekan kerja, dan masyarakat. Etika profesional mencakup berbagai aspek seperti kejujuran, kerahasiaan, keadilan, tanggung jawab sosial, serta kewajiban untuk terus meningkatkan kompetensi profesional.

Dalam jurnalistik profesionalisme dan etika harus berjalan dengan bersamaan. Hal ini bertujuan untuk agar dalam pekerjaannya, wartawan dapat bekerja secara profesional dan terarah sesuai dengan etika jurnalistik yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), etika profesionalisme jurnalistik dapat di artikan sebagai aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan para profesionalisme di bidang jurnalistik, yang mengutamakan prinsip kebenaran, objektivitas, keadilan, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik. Etika ini juga berfungsi untuk menjaga kredibilitas dan integritas media serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam dunia jurnalisme.

Etika profesionalisme jurnalistik merujuk pada prinsip-prinsip moral yang harus dipegang teguh oleh wartawan dan media dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan informasi untuk memastikan bahwa pekerjaan mereka dilakukan dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap publik. Beberapa poin penting dalam etika profesionalisme jurnalistik antara lain:

- 1 Keakuratan dan kebenaran: Jurnalistik harus memastikan bahwa informasi yang di sampaikan akurat dan dapat di pertanggung jawabkan. Mereka harus memverifikasi fakta sebelum diterbitkan.
- 2 Keadilan dan keseimbangan: Jurnalis harus berusaha untuk menyajikan berbagai sudut pandang secara adil, tanpa memihak atau menciptakan bias dalam pemberitaan.
- 3 Independensi dan objektivitas: Jurnalis harus menjaga independensinya dan menghindari pengaruh dari pihak luar, termasuk kepentingan politik, ekonomi, atau sosial, yang bisa mempengaruhi isi pemberitaan.
- 4 Kerahasiaan sumber: Jurnalis wajib menjaga kerahasiaan sumber informasi, terutama jika sumber tersebut meminta untuk tidak diungkapkan demi melindungi keselamatan atau privasinya.

- 5 Menghindari konflik kepentingan: Jurnalis harus menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, baik itu dalam hal hubungan pribadi, profesionalisme, atau keuangan yang dapat mempengaruhi pemberitaan mereka.
- 6 Tanggung jawab sosial: Jurnalis memiliki tanggung jawab untuk melaporkan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat, serta menghindari penyebaran informasi yang bisa merugikan atau menyesatkan publik.

Dengan mematuhi etika ini, jurnalis dapat menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap media yang mereka wakili.

2.1.2. Pengertian Kode Etik Jurnalistik

Kode etik diperlukan untuk mencegah perbuatan yang tidak diinginkan atau tidak etik oleh anggota sebuah profesi. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang memberikan petunjuk dan arahan bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi (Yuwono, 2011: 25).

Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan tidak ada paksaan dari luar. Sehingga itu merupakan kebutuhan internal profesi. Kode etik profesi juga dapat berubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak ketinggalan zaman. Dapat diambil kesimpulan kode etik merupakan sekumpulan norma atau asas yang tertuang secara tertulis dan diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan perilaku sehari-hari di masyarakat ataupun tempat kerja (Arifin, 2012).

Etika jurnalis mengatur proses pelaporan dan penerbitan, mulai dari penemuan gagasan, pengumpulan informasi, penulisan, dan editing hingga ke penerbitan karya jurnalistik.

Sedia Wiling Barus (2010) merupakan panduan moral dan etika kerja yang disusun dan diterapkan organisasi profesi untuk mencegah anggota organisasi profesi bersangkutan melakukan praktik-praktik yang

merugikan profesi dan masyarakat. Kebebasan pers dijadikan landasan melanggar hak orang lain, oleh sebab itu kode etik sangat diperlukan.

Secara etimologi jurnalistik terdiri dari dua suku kata, jurnal dan isik. Kata jurnal berasal dari bahasa Prancis yang berarti catatan harian. Adapun isik merujuk pada istilah estetika yang berarti ilmu pengetahuan tentang keindahan. Keindahan yang dimaksud adalah mewujudkan berbagai produk seni, dan keterampilan dengan menggunakan bahan-bahan yang diperlukannya. Dengan demikian secara etimologis jurnalistik dapat diartikan sebagai suatu karya seni dalam membuat catatan tentang peristiwa sehari-hari.

Secara umum dapat digambarkan bahwa, kode etik jurnalistik itu tersusun sebagai ikatan moral dan penghormatan insan pers (wartawan) terhadap norma-norma moral yang mulia, yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam setiap kegiatan.

Dilihat dari aspek hukum menurut Yurnaldi dalam buku jurnalistik siap pakai (1997: 120) kode etik jurnalistik dapat dikatakan sebagai hukum yang bersifat interen (self imposed) yang dibuat oleh wartawan Indonesia sendiri melalui organisasinya, untuk ditaati setiap wartawan.

Kode etik jurnalistik memiliki beberapa inti pokok yaitu:

- 1 Kepribadian wartawan, sebagai pencari dan pengumpul berita.
- 2 Wartawan sebagai penyiar (pimpinan redaksi dan redatur) yang memutuskan tentang disiarkan atau tidaknya sebuah berita.
- 3 Masyarakat atau pemerintah sebagai obyek berita.
- 4 Masyarakat atau pemerintah sebagai subyek berita.

Kode etik jurnalistik adalah aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh media pers dalam siarannya. Dalam dunia jurnalistik, media dikategorikan ke dalam tiga jenis berikut:

- 1 Media cetak, yang terdiri atas surat kabar, tabloid, majalah, dan buletin.
- 2 Media elektronik, yang terdiri atas televisi dan radio.

- 3 Media online, yaitu media internet, seperti website dan blog. (Yunus 2017: 27).

Kode etik jurnalistik sebagai acuan dasar yang harus di perhatikan setiap wartawan. Berikut ini digunakan beberapa acuan dasar yang menyangkut etika jurnalistik menurut Syarifuddin Yunus (2012) yaitu:

1. Mengaku profesi sebagai wartawan.
2. Melindungi kerahasiaan narasumber.
3. Mencari narasumber yang memiliki kapasitas.
4. Tidak menerima suap, hadiah, atau fasilitas lain dari narasumber.
5. Mengutamakan akurasi data.
6. Memberikan kesempatan klarifikasi.
7. Melaporkan secara berimbang.
8. Mebedakan dengan tegas antara fakta dan pendapat pribadi.
9. Menggunakan bahasa yang tepat.
10. Tidak menyembunyikan fakta.

2.1.3. Fungsi Kode Etik Jurnalistik

Menurut Yuwono ada tiga alasan kenapa kode etik profesi perlu dirumuskan secara tertulis yaitu: pertama, sebagai sarana sosial. Kedua, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, dan ketiga sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik (Yuwono, 2011).

Berdasarkan pendapat Tom E. Rolnicki dalam buku pengantar dasar jurnalis (2008), banyak keuntungan yang di peroleh wartawan dengan adanya kode etik jurnalistik yaitu:

1. Kode etik membantu membangun pemahaman profesionalisme bagi mereka yang bekerja untuk satu organisasi berita atau anggota asosiasi berita, dan bagi wartawan pada umumnya.
2. Kepatuhan pada kode etik akan menciptakan kreadibilitas di mata pembaca, publik akan percaya pada apa yang di tulis, dilihat, dan di dengarnya.

3. Kode etik memberikan ukuran yang seragam untuk mengatasi problem dalam pengumpulan berita. Karya jurnalis dipengaruhi oleh pelatihan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh jurnalis. Kode etik dimaksudkan untuk mengatasi problem yang mungkin disebabkan oleh jurnalis yang mungkin pelatihannya kurang dan nilai-nilai yang di bawahnya berbeda.

Kode etik jurnalistik menurut M. Alwi Dahlan, memiliki lima fungsi utama yaitu:

1. Melindungi keberadaan seorang profesional dalam berkiprah di bidangnya.
2. Melindungi masyarakat dari malpraktik oleh praktisi yang kurang profesional.
3. Mendorong persaingan sehat antar praktisi.
4. Mencegah kecurangan antar rekan profesi.
5. Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber.

2.1.4. Penerapan Kode Etik Jurnalistik

Berdasarkan undang-undang tentang pers No. 40 Tahun 1999, pengertian pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memiliki, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media elektronik, media cetak dan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-undang sebelumnya tertulis bahwa pengertian pers adalah lembaga kemasyarakatan sebagai alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, di lengkapi atau tidak di lengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil, atau alat-alat teknik lainnya (UU No. 11 Tahun 1966).

Menurut Ensiklopedi Pers Indonesia menyebut bahwa istilah pers merupakan sebutan bagi penerbit, perusahaan, kalangan yang berkaitan dengan media massa atau wartawan. Pengertian pers oleh Oemar Seno Adji, pengertian pers terbagi atas dua yaitu pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas. Dalam arti sempit pers berarti penyiapan gagasan, pemikiran, atau berita-berita dengan cara tertulis. Dalam arti luas berarti memancarkan pikiran atau berita-berita ataupun gagasan serta perasaan seseorang baik menggunakan kata-kata tertulis maupun lisan menggunakan semua alat media komunikasi yang ada. Batasan arti pers luas seiring berkembangnya teknologi, khususnya teknologi komunikasi.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya ada norma dan etika yang harus di taati agar tidak saling melanggar hak asasi. Dalam berkomunikasi telah dibuat aturan untuk ditaati oleh pers, yaitu kode etik jurnalistik. Walaupun telah ada kode etik jurnalistik yang berfungsi mengatur etika dalam dunia jurnalistik, berbagai tindakan pelanggaran etika masih terus terjadi. Hal ini terkait dengan kepentingan pers untuk mewujudkan tujuannya. Berbagai peristiwa muncul di ruang publik. Perkembangan teknologi komunikasi membuat peristiwa yang terjadi di belahan dunia bisa dengan mudah menjerap khalayak. Peristiwa inilah yang di sampaikan sebagai konsekuensi naluri komunikasi dan naluri ingin tahu.

Menurut Hoetasoehoet 2006, jurnalistik adalah ilmu terapan dari ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam menyampaikan isi pernyataannya kepada manusia lain. Jadi, ilmu jurnalistik adalah ilmu yang mempelajari cara penyampaian isi dan pernyataan. Perkembangan pers sudah melalui banyak tahap yang mendewasakan. Oleh karena itu pers berusaha melakukan berbagai tindakan penyesuaian. Pers harus peka dan tanggap terhadap lingkungan yang mereka hadapi dalam berbagai situasi dan kondisi.

Pelaksanaan kode etik jurnalistik sebagai norma atau di sebut landasan moral profesi wartawan di kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila,

oleh karena kode etik jurnalistik merupakan kaidah penentu bagi para jurnalis dalam melaksanakan tugasnya.

Sedangkan, Suseno 1991, membedakan profesi sebagai profesi pada umumnya dan profesi luhur. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian khusus. Pengertian profesi tersebut adalah pengertian profesi pada umumnya, sebab di samping itu terdapat pula yang di sebut sebagai profesi luhur, yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada masyarakat.

Tujuan etika profesi menurut Lubis, 1994, menyatakan bahwa yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika dalam kode etik profesi antara lain:

1. Standar-standar etika, yang menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada lembaga dan masyarakat umum.
2. Membantu para profesional dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat dalam menghadapi dilema dalam pekerjaan.
3. Standar etika bertujuan untuk menjaga reputasi atau nama para profesional.
4. Untuk menjaga kelakuan dan integritas para tenaga profesi.
5. Standar etika juga merupakan pencerminan dan pengharapan dari komunitasnya, yang menjamin pelaksanaan kode etik tersebut dalam pelayanannya.

Pada prinsip jurnalistik merupakan cara kerja media massa dalam mengelola dan menyajikan informasi kepada khlayak, yang tujuannya adalah untuk menciptakan komunikasi yang efektif, dalam arti menyebarluaskan informasi yang diperlukan. Jurnalistik sendiri berasal dari bahasa latin yaitu diurna dan dalam bahasa inggris journal yang berasa catatan harian.

Adinegoro mengatakan bahwa jurnalistik adalah kepandaian, kecerdasan, keterampilan, dalam menyampaikan, mengelola dan menyebar

luaskan berita. Karangan, artikel, kepada khalayak seluas-luasnya dan secepat-cepatnya. Sedangkan dalam kamus jurnalistik 1988, dijelaskan bahwa jurnalistik adalah suatu kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis untuk surat kabar atau majalah atau berkala lainnya.

2.1.5. Bentuk-Bentuk Tulisan Jurnalistik

A. Berita/ Straight News

Tulisan ini berisi laporan langsung yang hanya memuat fakta kejadian dan mengandung informasi. Sifat tulisan ini padat, lugas, singkat, dan jelas. Memenuhi unsur 5W+1H. Struktur berita dikenal dengan piramida terbalik. Semakin bawah tulisan itu, isi atau informasi yang disajikan semakin tidak penting (Patmono 1996).

Kata berita berasal dari sansekerta *virt*, yang secara harfiah ada atau berita. Berita harus berisi kejadian terbaru. Menarik bagi banyak orang dan di anggap penting (Cahya S, 2012).

2.2 Unsur 5W+1H Dalam Penulisan Berita

Sedia Willing Barus (2010) memberikan penjabaran tentang unsur dasar dalam penulisan berita. Dalam praktik jurnalistik para pakar memberikan pedoman dalam menulis berita dengan menggunakan formula (rumusan) 5W+1H. Persyaratan ini pertama kali diperkenalkan oleh kantor berita associated press (AP). Formula tersebut juga sering disebut sebagai gaya penulisan berita AP. Berikut ringkasan dari formula 5w+1h.

Who: berita harus mengandung unsur “siapa”. Ini dapat ditarik ekuivalensinya dengan unsur prominence, harus menyebutkan sumber yang jelas. Dengan kata lain berita harus memiliki sumber yang jelas. Bisa mengacu pada individu, kelompok, atau lembaga. Tidak diperbolehkan membuat berita yang tidak jelas.

What: unsur “apa” adalah mencari tahu hal yang menjadi topik berita tersebut. Jika menyangkut kejadian, yang menjadi “apa” adalah kejadian atau peristiwa tersebut.

Where: berita juga harus menunjuk pada tempat kejadian, “dimana” terjadinya peristiwa atau fakta itu. Ini merupakan bagian dari unsur jarak (proximity). Jadi “dimana” menyangkut tentang masalah jauh dekatnya jarak peristiwa dalam arti geografis ataupun batin/emosional.

When: unsur “kapan” ini yang dimaksud dengan unsur baru terjadinya (timeliness) demi mengejar aktualitas seperti yang dipersyaratkan oleh MacDougall.

How: “bagaimana” terjadinya suatu peristiwa sangat dinantikan oleh pembaca. Keingintahuan mengenai “bagaimana terjadinya” ini bisa mencakup gabungan unsur-unsur berita lainnya seperti daya tariknya, cuatannya, akibat yang ditimbulkannya, kedekatan emosi, dan bahkan kehangatan emosi (Barus 2010).

2.2.1 Penyimpangan Kode Etik Jurnalistik

Kode etik jurnanisme telah dimiliki di semua tingkatan, mulai dari lingkup lokal hingga internasional. Secara terbuka dalam kode etik tersebut telah dirumuskan fungsi-fungsi dan tugas-tugas jurnalis. Dengan begitu para jurnalis dibekali prinsip-prinsip yang memandu mereka menjalankan profesinya. Sementara itu di Indonesia, keprofesian jurnanisme masih menghadapi beberapa masalah.

Pertama, untuk sebagian wartawan masih belum dapat dikatakan sebagai pekerjaan penuh atau full time job, karena masih banyak yang melakukannya dengan merangkap pekerjaan lain. Ini berkaitan dengan belum memadainya pendapatan/gaji sebagian besar wartawan. Survei Dewan Pers tahun 2009 menunjukkan malah masih banyak gaji wartawan di bawah UMR.

Kedua, tidak adanya proteksi terhadap profesi ini, sehingga semua orang bisa jadi jurnalis. Juga tidak dikenal sistem lisensi. Akibatnya segala macam orang bisa berkecimpung di bidang ini, yang menimbulkan masalah tersendiri.

Dalam setiap profesi harus memiliki kode etik mereka tersendiri, termasuk dalam jurnalistik. Karena pedoman dan kontrol tingkah laku diatur dalam kode etik jurnalistik. Akan tetapi, di Indonesia maupun di luar negeri masih banyak yang melanggar kode etik tersebut.

2.2.2 Laporan atau Reportase

Laporan adalah bentuk berita yang dikembangkan lebih luas, lengkap dan terinci mengenai suatu peristiwa. Tulisan ini didasarkan atas pengamatan langsung maupun keterangan orang lain. Laporan harus tetap berpatokan pada unsur-unsur 5W+1H. Wartawan harus menghindari memasukan opini dalam laporannya.

Laporan atau reportase adalah tulisan yang menyajikan informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian secara objektif, faktual, dan terperinci. Tujuan dari laporan atau reportase adalah memberikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai suatu peristiwa kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa.

Laporan biasanya lebih formal dan bisa mencakup berbagai jenis, seperti laporan ilmiah, laporan bisnis, laporan keuangan. Sementara reportase lebih sering digunakan dalam konteks jurnalistik untuk melaporkan peristiwa atau kejadian yang terjadi di masyarakat. Reportase juga sering mencakup elemen naratif dan menggali lebih dalam ke dalam latar belakang atau konteks dari suatu peristiwa.

2.2.3 Feature atau Tutaran

Bentuk tulisan ini lebih lengkap dan terinci. Kelengkapan feature terletak pada bumbu imajinasi penulisnya. Wartawan boleh memasukan opini dan meramu dengan fakta yang disajikan sehingga tulisannya lebih menarik dan berisi. Ia juga bisa membentuk satire (sindiran).

Feature dan tuturan keduanya adalah jenis tulisan yang sering ditemukan dalam jurnalistik, namun keduanya memiliki perbedaan dalam gaya dan tujuan ialah:

1. Feature adalah jenis tulisan yang lebih mendalam dan bersifat naratif. Biasanya, feature berfokus pada suatu topik atau peristiwa dan menyajikan dengan cara yang lebih menarik dan detail. Tulisan ini lebih fleksibel, tidak terikat oleh struktur yang ketat seperti berita hard news, dan sering kali menggunakan teknik storytelling. Tujuan dari feature ini untuk menghibur, mengedukasi, atau memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca tentang suatu peristiwa, individu, atau isu. Karakteristik dari feature ini menggabungkan fakta dengan elemen emosional atau personal. Ada penggunaan deskripsi yang kuat, wawancara, dan narasi yang membawa pembaca lebih dekat dengan topik yang dibahas.
2. Tuturan adalah konteks jurnalistik atau penulisan adalah cara seseorang menyampaikan cerita atau informasi, bisa berupa narasi yang lebih informal, lebih bersifat pribadi, dan terkadang lebih mudah dipahami. Dalam tulisan jurnalistik, tuturan sering kali lebih mengutamakan sudut pandang atau pengalaman pribadi dari narator atau sumbernya. Tujuan dari tuturan untuk menyampaikan cerita dengan cara yang mudah diikuti dan mungkin lebih bersifat pengalaman atau pendapat pribadi. Karakteristik dari tuturan ini bisa lebih fleksibel dalam hal gaya bahasa dan struktur, sering kali menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan komunikatif.

Secara sederhana, feature cenderung lebih berfokus pada penyajian informasi secara lebih mendalam dan terstruktur dengan detail, sementara tuturan bisa lebih informal dan mengedepankan narasi atau pengalaman pribadi.

2.2.4 Tajuk Rencana atau Editorial

Tajuk rencana merupakan cerminan pendapat surat kabar atau majalah yang bersangkutan. Wartawan yang mendapat tugas menulis tajuk rencana harus memiliki wawasan yang luas, karena tidak semua kejadian dapat diangkat menjadi pokok masalah yang layak dibahas oleh redaksi. Salah satu ukuran untuk mengangkat persoalan dalam tajuk rencana ialah adanya aspek khusus yang menonjol terkait kepentingan umum atau bangsa (Patmono SK, 1996).

Tajuk rencana dan editorial sering digunakan secara bergantian, tetapi keduanya memiliki perbedaan kecil dalam konteks penerbitan dan tujuan penyampaian.

1. Tajuk rencana adalah artikel atau opini yang dipublikasikan oleh media massa yang mewakili pandangan atau sikap lembaga media tersebut terhadap suatu isu atau peristiwa tertentu. Ini biasanya ditulis oleh tim redaksi atau pemimpin redaksi. Tujuan dari tajuk rencana untuk memberikan penilaian atau pendapat media mengenai suatu isu yang sedang berkembang di masyarakat. Tajuk rencana sering digunakan untuk memengaruhi pendapat publik atau mendorong tindakan tertentu. Karakteristik tajuk rencana bersifat formal, mewakili kebijakan editorial media, dan biasanya menghindari sudut pandang pribadi penulis. Fokusnya adalah pada analisis mendalam dan pandangan yang disampaikan dengan bahasa yang tegas dan jelas.
2. Editorial adalah artikel opini yang memberikan pandangan tentang isu-isu tertentu, biasanya juga diterbitkan oleh media massa. Namun, editorial bisa lebih fleksibel dalam penulisannya, dan dapat

mengandung pandangan pribadi penulis meskipun tetap menyampaikan analisis yang berdasarkan fakta. Tujuan editorial sama seperti tajuk rencana, editorial bertujuan memberikan opini atau perspektif media mengenai suatu peristiwa atau masalah yang relevan dengan publik. Karakteristik editorial lebih mengutamakan pendapat atau interpretasi dari penulis, tetapi tetap memerlukan argumentasi yang kuat dan didasarkan pada data atau fakta yang relevan

Tajuk rencana biasanya lebih resmi dan lebih mewakili pandangan lembaga media secara keseluruhan, sedangkan editorial bisa lebih pribadi dan lebih berfokus pada pandangan individu yang menulisnya. Keduanya, bagaimanapun, berfungsi untuk mempengaruhi opini publik atau menyoroti isu tertentu.

2.2.5 Artikel

Tulisan yang berbentuk artikel seluruhnya berisi opini penulis. Fakta hanya digunakan sebagai dukungan terhadap opini yang dikemukakannya; merupakan hasil pengumpulan intelektual penulsi.

Menurut (Mayestika & Hasmira 2021) artikel adalah salah satu bentuk tulisan yang umum ditemukan di berbagai media, seperti koran, majalah, blog, atau situs web. Artikel bisa membahas berbagai topik, mulai dari berita, opini, hiburan, hingga analisis yang lebih mendalam tentang suatu isu. Artikel biasanya bertujuan untuk memberikan informasi, menjelaskan, atau menhibur pembaca.

- a. Artikel biasanya terdiri dari tiga bagian utama ialah:
 1. Pendahuluan
 2. Isi
 3. Penutup
- b. Jenis artikel:
 1. Artikel informasi
 2. Artikel opini

3. Artikel feature
4. Artikel ilmiah

Artikel bisa ditulis dengan gaya bahasa formal maupun informal, tergantung pada audiens dan tujuan dari tulisan itu sendiri. Gaya penulisan yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami biasanya lebih diskusi.

2.2.6 Kolom

Kolom juga merupakan opini penulis. Tulisan-tulisan kolom selalu reflektif atau bersifat renungan. Kolom harus mampu menggugah pembacanya untuk bercermin dengan tulisan itu, sehingga menarik kesimpulan sendiri.

Kolom dalam penulisan jurnalistik adalah sebuah tulisan yang biasanya berisi opini atau pandangan pribadi dari penulis mengenai suatu topik tertentu (Anti Salim & Arsyad. J 2020). Kolom sering muncul secara rutin di media massa seperti surat kabar atau majalah. Biasanya, kolom mencerminkan sudut pandang atau analisis penulis terhadap isu-isu aktual atau peristiwa penting yang sedang terjadi.

Tujuan kolom untuk memberikan perspektif, menyampaikan ide, dan merangsang diskusi atau pemikiran kritis di kalangan pembaca. Penulis kolom sering kali menggunakan gaya penulisan yang lebih personal dan lebih bebas dibandingkan dengan artikel berita yang lebih objektif.

2.3 Prinsip Utama Etika Jurnalistik

Dalam rinciannya banyak prinsip-prinsip yang dipedomani oleh etika jurnalisme, tetapi bila semuanya ditelusuri maka yang utama adalah prinsip-prinsip tentang:

1. Akurasi

Untuk memenuhi janji bahwa jurnalis mencari dan menyampaikan kebenaran, maka pertama-tama, informasi yang hendak di sampaikan ke masyarakat lebih dulu ditapis dengan takaran keakuratan. Dalam Random House Webster's College Dictionary, akurasi didefinisikan sebagai suatu kondisi atau kualitas sebagaimana yang benar (the condition or a quality of being true); tepat (correct); atau pasti (exact), persis (precision); dan kepastian (exactness). Dengan kata lain, informasi yang akurat itu bebas dari kesalahan, suatu kualitas yang tumbuh dari kehatian-kehatian (carefulness); dan tunduk sepenuhnya pada kebenaran (exact conformity to truth). Prinsip akurasi berarti berita ataupun karya jurnalistik lain yang ditulis oleh wartawan dan disiarkan oleh media, benar substansinya, faktafaktanya, dan penulisannya, dan berasal dari sumber informasi yang otoritatif dan kompeten, serta tidak biasa.

2. Independensi

Usaha untuk memperoleh dan menyampaikan kebenaran mestilah dilakukan tanpa ada intervensi dari pihak mana pun. Untuk itu jurnalis dan media menegakkan keindependenan dalam melakukan aktivitas jurnanisme. Indenpendensi menjadi prinsip yang dipegang teguh oleh seorang wartawan baik selaku pribadi maupun institusi media tempatnya bekerja.

3. Objektivitas (disebut juga balanced)

Objektivitas atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah keberimbangan (balance). Konsep "the truth" dan "reality" tidak terpisah dari konsep objektivitas. Prinsip objektivitas merupakan ketentuan yang bermaksud untuk mencegah kemungkinan atau kecendrungan wartawan terpengaruh oleh subjektivitas pribadi maupun pihak lain dalam memandang dan menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian. Prinsip ini bertujuan agar wartawan meninjau setiap masalah dari berbagai sudut pandang supaya lebih mencerminkan kebenaran.

4. Balance

Dalam memberitakan suatu peristiwa atau kejadian, seorang wartawan harus memerhatikan prinsip keberimbangan (balance), yakni memberikan tempat dan kesempatan yang sejajar secara proporsional bagi dua atau lebih pihak ataupun pandangan yang berkenaan dengan yang diberitakan. Jurnalis harus menampilkan pandangan dan fakta yang berimbang antara dua atau lebih pihak yang terkait dengan peristiwa yang akan diberitakan. Dengan demikian tidak terjadi keberpihakan pada salah satu sisi saja.

5. Fairness

Prinsip fairness diwujudkan dalam peliputan yang transparan, terbuka, jujur dan adil yang didasarkan pada dealing yang langsung (transparent, open, honest dan fair coverage based on straight dealing). Prinsip ini dimaksudkan agar berita dan tulisan yang dibuat oleh jurnalis memberi tempat dan peluang bagi semua pihak yang dianakemaskan ataupun yang dianaktirikan. Kelemahan dalam pelaksanaan asas fairness umumnya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: kurangnya kesadaran mengenai hal ini dan ketergesaan ataupun desakan waktu yang dialami para jurnalis.

6. Imparsialitas

Pada hakikatnya prinsip ini merupakan penekanan kembali (reemphasizing) tentang ketidak berpihakan jurnalis dan media dalam mencari, menulis dan menyiarkan berita ataupun karya jurnalistik lainnya. Imparsialitas diartikan sebagai peliputan yang fair dan pikiran terbuka untuk menggali semua pandangan yang signifikan (fair and openminded coverage exploring all significant views).

7. Menghormati Privasi

Sesungguhnya setiap pribadi mempunyai hak untuk tidak dijadikan perhatian publik (the right to be out of the public eye) atau untuk tidak diperkenalkan (anonymity). Hak untuk menjalani kehidupan tanpa orang yang asing mengetahui detailnya. Isu privasi berkenaan dengan berbagai situasi yang memunculkan tantangan pengambilan keputusan

etis (ethical decision-making challenges) bagi para jurnalis dan para eksekutif dan pimpinan surat kabar ataupun sistem penyiaran.

8. Akuntabilitas kepada publik.

Prinsip akuntabilitas kepada publik ialah setiap jurnalis harus meniatkan sejak awal, bahwa segala proses dan hasil karyanya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Prinsip ini mengharuskan para jurnalis untuk dapat mempertanggungjawabkan atau akuntabel dalam proses dan produk yang dihasilkan dalam melakukan aktivitas jurnanisme. Prinsip ini bersumber pada hak-hak khalayak (audience rights) sebagai salah satu stakeholder dalam proses komunikasi.

Untuk dapat memenuhi misi jurnanisme yang mulia, mencari dan menyampaikan kebenaran, jurnalis dibekali dengan sejumlah prinsip etika yang berfungsi sebagai penapis informasi yang dikumpulkan dan disunting untuk kemudian disajikan kepada khalayak. Serangkaian penapis itu bila diterapkan, akan menjamin karya jurnalistik yang dihasilkan oleh para jurnalis dapat memenuhi peran sosial dan ekspektasi masyarakat kepada mereka.

2.3.1 Aktivitas Jurnalistik

Wartawan/Jurnalis ialah orang melakukan pekerjaan mencari informasi, mengumpulkan dan memilih, mengolah berita dengan cermat dan menyajikan secepatnya kepada masyarakat melalui media massa yang tercetak atau elektronik. Dalam aktivitas jurnalistik, reporter, editor, juru kamera berita, juru photo berita, redaktur dan editor audio visual juga dapat dikatakan sebagai jurnalis.

Orang yang tidak terikat oleh suatu lembaga media massa tetapi karyanya dimuat di media massa disebut dengan *wartawan freelance*. Sedangkan orang yang bekerja dan terikat pada salah satu media massa yang pekerjaannya mencari informasi, menyeleksi berita yang akan dimuat di media tempat ia bekerja disebut *newsgetter*.

Seorang jurnalis dalam meliput berita haruslah mencari dan mengumpulkan berbagai sumber fakta sebanyak-banyaknya dan harus diteliti kebenaran faktanya. Jurnalis juga harus peka terhadap situasi dan kondisi sekitarnya dan tetap jujur serta tanggap. Dalam memberitakan informasi jurnalis pun harus memiliki kreativitas yang tiada batas.

2.3.2 Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos*. Artinya karakter, sifat, atau kebiasaan. Etika diartikan sebagai suatu soal internal dari karakter kebijakan yang memotivasi orang untuk bertindak secara benar (Salam, 2002). Etika biasanya berkaitan erat dengan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin yaitu *mos* dan dalam bentuk jamaknya adalah *mores*, yang berarti juga kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Secara intrinsik kata *ethic* berkaitan dengan masalah perilaku yang benar di tengah kehidupan bermasyarakat. Sedangkan secara etimologis, etik mengindikasikan suatu fokus menjadi orang-orang baik, berkarakter yang handal, dan berperilaku yang tepat.

Ward mendefinisikan etika sebagai *the analysis, evaluation, and promotion of correct conduct and/or good character, according to the best available standards*. Etika sebagai analisis, evaluasi dan promosi perilaku yang benar dan/atau karakter yang bagus menurut standart terbaik yang ada.

2.3.3 Etika Jurnalistik

David L. Paletz (2020), berpendapat bahwa jurnalistik adalah seperangkat prinsip yang mencakup pengutamaan kebenaran, keseimbangan, dan keberagaman pandangan dalam pemberitaan. Etika jurnalistik menurut Paletz juga mengharuskan jurnalis untuk bertindak dengan independensi dan menghindari konflik kepentingan.

Etika jurnalistik adalah standart aturan perilaku dan moral yang mengikat para jurnalistik dalam melaksanakan pekerjaanya. Etika jurnalistik ini sangat penting dimana bukan hanya mencerminkan standart kualitas jurnalistik namun untuk menghindari dan melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan dari tindakan atau perilaku keliru dari seorang jurnalis.

2.3.4 Etika Jurnalistik Dalam Penggunaan Teknologi

Etika jurnalistik dalam penggunaan teknologi mencakup prinsip-prinsip yang harus di terapkan oleh jurnalis dalam menggunakan teknologi baru seperti internet, media sosial, dan platform digital lainnya. Sugiyono menekankan bahwa jurnalis harus menjaga kualitas dan integritas informasi yang di sampaikan dengan mematuhi prinsip-prinsip jurnalistik yang baik, seperti keakuratan, obejektiv, dan tidak memihak.

Etika jurnalistik juga menjadi perhatian penting dalam era digital. Jurnalis harus mempertimbangkan pertanyaan etis yang kompleks terkait privasi, hak cipta, dan hak-hak individu dalam penggunaan teknologi. Beberapa pertimbangan etis meliputi:

1. Privasi: Bagaimana melaporkan berita tanpa mengabaikan privasi individu. Jurnalis harus memahami batasan dan memperlakukan informasi pribadi dengan hati-hati.
2. Hak cipta: Penggunaan materi dari sumber lain harus mematuhi hak cipta. Jurnalis harus menghormati karya orang lain dan memberikan kredit yang sesuai.
3. Dampak berita: Jurnalis harus mempertimbangkan dampak dari berita yang mereka laporkan terhadap masyarakat maupun individu yang terkena dampaknya.

Salah satu tantangan utama yang di hadapi jurnalistik dalam era digital adalah masalah kecepatan dalam melaporkan berita. Dalam upaya untuk memenangkan persaingan dan mendapatkan perhatian pembaca,

banyak media cenderung mengutamakan kecepatan dari pada memeriksa fakta atau memastikan kebenaran berita. Ini dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah atau tidak akurat, dan mengancam integritas jurnalistik.

Selain itu, jurnalis juga harus berhati-hati dalam mengelola informasi yang disebarkan melalui teknologi, untuk menghindari penyebaran berita hoaks atau informasi yang tidak terverifikasi. Penggunaan teknologi harus dilakukan dengan bertanggung jawab, dengan tetap mengutamakan kepentingan publik dan menghormati hak-hak individu, termasuk hak privasi.

Namun, beberapa media dan jurnalistik telah menerapkan teknologi untuk memeriksa dan memverifikasi kebenaran berita sebelum melaporkannya ke public. Alat seperti google fact dan aplikasi pengenalan wajah, yang dapat membantu jurnalistik memastikan keaslian informasi sebelum disebarkan.

Sebagai kesimpulannya, etika jurnalistik dalam penggunaan teknologi harus berfokus pada kejujuran, tanggung jawab, dan kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat.

2.3.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Etika Profesional Jurnalistik

Beberapa faktor yang mempengaruhi etika profesionalisme jurnalistik meliputi beberapa aspek yang berhubungan dengan lingkungan kerja, nilai pribadi jurnalis, dan kondisi sosial politik (Attami & Riduwan 2015). Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi etika profesionalisme jurnalistik:

1. Tekanan dari media atau perusahaan: Media atau perusahaan tempat jurnalis bekerja bisa memberikan tekanan untuk menghasilkan berita yang sensasional atau berpihak pada kepentingan tertentu. Tekanan

semacam ini dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi dalam pelaporan.

2. Pengaruh kepentingan politik atau ekonomi: Dalam beberapa kasus, kepentingan politik atau ekonomi dapat mempengaruhi jurnalis atau melaporkan informasi dengan cara yang bias atau tidak sepenuhnya akurat. Hal ini sering terjadi ketika media memiliki hubungan dengan kelompok politik atau pemilik yang memiliki agenda tertentu.
3. Nilai dan etika pribadi jurnalis: Setiap jurnalis memiliki nilai pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam melaporkan berita. Namun, profesionalisme mengharuskan mereka untuk mengesampingkan pandangan pribadi dan melaporkan berita dengan objektivitas dan integritas.
4. Tuntutan waktu dan kecepatan: Dalam dunia jurnalisme modern, tuntutan untuk segera melaporkan berita dapat menyebabkan jurnalis terburu-buru dan kurang teliti dalam memeriksa fakta. Keterbatasan waktu seringkali memengaruhi kualitas dan akurasi laporan yang dihasilkan.
5. Teknologi dan media sosial: Perkembangan teknologi dan kehadiran media sosial mempengaruhi cara jurnalis bekerja. Informasi dapat dengan cepat tersebar luas, namun ini juga menambah tantangan untuk memverifikasi kebenaran informasi sebelum di terbitkan, yang kadang menekan prinsip etika.
6. Norma sosial dan budaya: Setiap masyarakat memiliki nilai norma dan sosial yang berbeda, dan hal ini dapat mempengaruhi cara jurnalis melaporkan suatu kejadian. Dalam beberapa budaya, misalnya, ada kecenderungan untuk lebih memperhatikan isu-isu yang bersifat sensitif atau pribadi, yang bisa mempengaruhi keputusan etis jurnalistik.
7. Pendidikan dan pelatihan jurnalis: Pendidikan dan pelatihan yang diterima oleh jurnalis sangat mempengaruhi mereka tentang etika jurnalistik. Jurnalis yang di latih dengan baik dalam kode etika

jurnalistik cenderung lebih menghargai dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam pekerjaannya.

8. Kepentingan dan harapan audiens: Tuntutan audiens terhadap berita yang sensasional atau memuat informasi tertentu dapat menjadi faktor yang mempengaruhi etika jurnalistik. Jurnalis mungkin merasa tertekan untuk memenuhi harapan audiens meskipun ini bertentangan dengan prinsip –prinsip objektivitas atau kebenaran.

Secara keseluruhan, faktor-faktor ini berperan dalam membentuk praktik etika jurnalistik, dan jurnalis harus berusaha untuk mengatasi pengaruh negatif dari faktor-faktor tersebut agar tetap menjaga profesionalisme dan integritas dalam pekerjaan mereka.

2.3.6 Profesionalisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) profesional diartikan sebagai sesuatu yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesional yaitu serangkaian keahlian yang dipersyaratkan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan secara efisien dan efektif dengan tingkat keahlian yang tinggi dalam rangka untuk mencapai tujuan pekerjaan yang maksimal.

Orang profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan karena ahli dibidang tersebut dan meluangkan seluruh waktu, tenaga, dan perhatiannya untuk pekerjaan tersebut. Orang yang profesional adalah orang yang mempunyai komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaan, melibatkan seluruh dirinya dengan giat, tekun dan serius menjalankan pekerjaannya. Disiplin dan keseriusan adalah perwujudan dari komitmen atas pekerjaannya. Orang profesional diandalkan dan dipercaya masyarakat karena mempunyai komitmen moral/pribadi serta tanggung jawab yang mendalam atas pekerjaannya (Keraf, 1998).

Sikap profesional tercermin pada pelaksanaan kualitas yang merupakan karakteristik atau tanda suatu profesi atau seorang profesional. Dalam

pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan, dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang ditetapkan.

Profesionalisme berasal dari bahasa Anglosaxon yang mengandung pengertian kecakapan, keahlian dan disiplin. Profesionalisme mengandung juga pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sumber penghidupan. Kamus Webster Amerika menegaskan bahwa profesionalisme adalah suatu tingkah laku, suatu tujuan atau rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya (Anoraga, 2009). Profesionalisme sangat mencerminkan sikap seorang terhadap pekerjaan maupun jenis pekerjaannya/profesinya. Menurut Abeng (dalam Moeljono, 2003) pengertian professional terdiri atas tiga unsur, yaitu knowledge, skill, integrity, dan selanjutnya ketiga unsur tersebut harus dilandasi dengan iman yang teguh, pandai bersyukur, serta kesediaan untuk belajar terus-menerus.

Profesionalisme adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan atau masyarakat.

Lekatompessy (2003) mendefinisikan profesionalisme sebagai berikut: Profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual, profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan atribut individual yang penting tanpa melihat apakah pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak.

2.3.7 Aspek-aspek Profesionalisme

Aspek profesionalisme mencakup beberapa elemen penting yang membentuk sikap, perilaku, dan kualitas kerja seseorang dalam lingkungan profesional (Wibawa, D. 2012). Beberapa aspek profesionalisme yang utama ialah:

1. Aspek potensial, bahwa setiap tenaga kerja memiliki potensi-potensi hereditas yang bersifat dinamis yang terus berkembang dan dapat dikembangkan. Potensi-potensi itu antara lain : daya mengingat, daya berfikir, bakat dan minat, motivasi, dan potensi-potensi lainnya.
2. Aspek profesionalisme atau vokasional, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kemampuan dan keterampilan kerja atau kejujuran dalam bidang tertentu dengan kemampuan dan keterampilan itu dia dapat mengabdikan dirinya dalam lapangan kerja tertentu dan menciptakan hasil yang baik secara optimal.
3. Aspek fungsional, bahwa setiap tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya secara tepat guna, artinya dia bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang yang sesuai pula. Misalnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam bidang elektronik seharusnya bekerja dalam bidang pekerjaan elektronik bukan bekerja sebagai tukang kayu untuk bangunan.
4. Aspek operasional, bahwa setiap tenaga kerja dapat mendayagunakan kemampuan dan keterampilannya dalam proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan kerja yang sedang ditekuninya.
5. Aspek personal, bahwa setiap tenaga kerja harus memiliki sifat-sifat kepribadian yang menunjang pekerjaannya, misalnya sikap mandiri dan tangguh, bertanggung jawab, tekun dan rajin, mencintai pekerjaannya, berdisiplin dan berdedikasi yang tinggi.
6. Aspek produktifitas, bahwa setiap tenaga kerja harus memiliki motif berprestasi, berupaya agar berhasil, dan memberikan hasil dari pekerjaannya baik kuantitas maupun kualitas.

Semua aspek ini saling mendukung dan berkontribusi terhadap citra profesional yang baik dalam dunia kerja.

2.3.8 Karakteristik dan Ciri Profesionalisme

Profesionalisme merujuk pada sikap, perilaku, dan standar kerja yang menunjukkan keahlian dan komitmen terhadap kualitas dalam bekerja. Anoraga (2009) mengemukakan beberapa ciri profesionalisme yaitu :

1. Profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil, sehingga dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu.
2. Profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan.
3. Profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil tercapai.
4. Profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh “keadaan terpaksa” atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup.
5. Profesionalisme memerlukan adanya kebulatan fikiran dan perbuatan, sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi.

Profesionalisme adalah kualitas yang dihargai dalam dunias kerja dan sering menjadi penentu kesuksesan seseorang dalam karier.

2.3.9 Dimensi Profesionalisme

Dimensi profesionalisme mengacu pada berbagai aspek yang mencerminkan perilaku dan sikap seseorang profesional dalam bekerja. Dimensi profesionalisme secara umum adalah:

1. Altruisme yaitu berani berkorban, mementingkan orang lain bukan diri sendiri, hal ini ditunjukan melalui sikap suka membantu, problem solver, membuat keputusan secara tepat dan obyektif.
2. Komitmen terhadap kesempurnaan, sikap profesionalnya yaitu efektif dan efisien, memberikan atau mengerjakan yang terbaik.

3. Toleransi, sikap profesionalnya ditunjukkan dengan sikap adaptasi, suka bekerjasama, komunikatif, bijaksana, dan meminta tolong jika memang memerlukan.
4. Integritas dan karakter, sikap profesionalnya ditunjukkan melalui sikap jujur, teguh, tidak plin-plan, percaya diri, berjiwa pemimpin yang memberi teladan.
5. Respek kepada semua orang, profesional dalam menerima kritik, menepati janji, memegang rahasia, menghormati orang lain dan tahu diri.
6. Sense of duty, sikap profesionalnya adalah disiplin dan tepat waktu.

Dimensi-dimensi ini bekerja sama untuk membentuk citra seseorang profesionalisme yang dapat diandalkan dan dihormati dalam bidangnya.

2.3.10 Faktor-faktor sikap profesionalisme

Sikap profesionalisme mencakup berbagai faktor yang memengaruhi cara seseorang berperilaku dalam lingkungan kerja. Faktor-faktor yang mendukung sikap profesionalisme menurut Andriyani (2015) adalah:

1. Performance. Performance dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, penampilan kerja. Menurut Gibson, performance atau kehandalan prestasi kerja adalah hasil yang diinginkan dari perilaku, prestasi dihasilkan dalam urutan maupun kurun waktu tertentu.
2. Akuntabilitas pegawai Akuntabilitas merupakan suatu kebijakan strategis, hal ini harus dapat di implementasikan untuk menciptakan kepatuhan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai. Dengan demikian akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban kinerja dari seorang atau sekelompok, kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang sesuai dengan aturan yang ada.
3. Loyalitas pegawai. Loyalitas pegawai yang berkaitan dengan karakteristik sosok profesionalisme menurut islami dalam Royen

(2007) adalah kesetiaan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan dan rekan sekerja, berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya. Dengan demikian, maka para pegawai diharapkan supaya mampu menunjukkan loyalitas yang tinggi dalam seluruh aspek pekerjaannya. Loyalitas tidak memandang tingkatan artinya tidak membedakan pemberian pelayanan kepada setiap orang.

4. Kemampuan pegawai Profesionalisme pegawai sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan pegawai yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Istilah tersebut mengacu kepada potensi pegawai dalam mengerjakan tugas dan bagiannya.

Sikap profesionalisme ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis.

2.4 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun Penelitian	Judul	Hasil
1.	Rahmat & Susanti (2021)	Peran Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dalam Meningkatkan Profesionalisme Media Digital di Indonesia	membahas kontribusi dan efektivitas organisasi SMSI dalam membina media siber agar dapat menjalankan fungsinya secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode wawancara terhadap pengurus SMSI serta pengamatan terhadap program-program yang dijalankan organisasi tersebut, baik

			di tingkat pusat maupun daerah. Fokus utama kajiannya adalah pada aspek pelatihan jurnalistik, pendampingan legalitas media, serta penguatan kode etik bagi perusahaan pers berbasis digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMSI memiliki peran penting dalam membantu media siber meningkatkan profesionalismenya, terutama melalui pelatihan jurnalistik, advokasi hukum, dan pembinaan untuk mengikuti sertifikasi Dewan Pers. Namun, efektivitas peran ini masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Di daerah-daerah terpencil, seperti wilayah kepulauan dan pelosok, termasuk Kepulauan Nias, banyak media yang masih belum tersentuh oleh program pembinaan SMSI.
2.	Indra Prawira dkk (2021)	Objektivitas tiga media siber indonesia: Studi konten berita konflik israel-palestina	Penelitian ini fokus pada tantangan yang dihadapi oleh para jurnalis dalam menjaga integritas dan standar etika dalam pemberitaan di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wartawan di wilayah pesisir sering kali mengalami tekanan dari

			berbagai pihak, termasuk pejabat lokal, pengiklan, dan kelompok kepentingan tertentu, yang dapat mempengaruhi independensi pemberitaan mereka. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan pelatihan membuat banyak jurnalis kesulitan untuk secara konsisten menerapkan kode etik jurnalistik, khususnya dalam hal verifikasi informasi dan keberimbangan berita.
3.	Saragih (2019)	Etika Jurnalistik dan Profesionalisme Wartawan Media Online di Wilayah Pesisir	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berita perang internasional cenderung tidak menaati kode etik jurnalistik dalam hal keberimbangan berita. Hal tersebut disebabkan faktor keterbatasan akses jangkauan dan faktor keberpihakan media.
4.	Efen Nurfiana (2024)	Analisis praktik Robotic Journalism dalam produksi Berita	Robetic Journalism di pandang sebagai bentuk kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya di sektor media massa dan jurnalis. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan teknologi internet, robetic journalism dapat memproduksi artikel berita dengan jumlah banyak dalam waktu yang singkat.
5.	Sitompul (2022)	Analisis Kinerja Media Lokal di Nias	secara khusus meneliti media siber di Kepulauan Nias. Hasil penelitian

		Berdasarkan Standar Dewan Pers	menunjukkan bahwa sebagian besar media lokal belum terverifikasi oleh Dewan Pers dan belum menjalankan standar kode etik jurnalistik secara konsisten. Banyak wartawan yang belum mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip independensi, akurasi, dan verifikasi. Penelitian ini menjadi penting karena menunjukkan kondisi nyata di lapangan dan menjadi dasar perlunya evaluasi terhadap praktik jurnalistik media siber di wilayah tersebut.
--	--	--------------------------------	--

2.5 Kerangka Berpikir

Sugiyono (2018), menyampaikan bahwa kerangka berpikir adalah teoritis atau konseptual yang digunakan untuk merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Kerangka pemikiran membantu peneliti untuk menyusun landasan teori dan memberikan kerangka acuan bagi pengumpulan analisis data. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat terlihat melalui gambar di bawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

